

ISU-ISU KONTEMPORER

**BIDANG PRAKTEK PEKERJAAN
SOSIAL, KESEJAHTERAAN SOSIAL,
PROFESI PEKERJAAN SOSIAL**

**EDITOR:
SANTOSO TRI RAHARJO**

ISU-ISU KONTEMPORER

**BIDANG PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL,
KESEJAHTERAAN SOSIAL,
PROFESI PEKERJAAN SOSIAL**

**EDITOR
SANTOSO TRI RAHARJO**



ISBN: 978-602-0810-45-4

Judul Buku:

**ISU-ISU KONTEMPORER BIDANG PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL,
KESEJAHTERAAN SOSIAL, PROFESI PEKERJAAN SOSIAL**

Editor/Penulis:

Santoso Tri Raharjo

Penerbit:



Jl. Raya Bandung – Sumedang km 21 Sumedang

Tlp. (022) 843 88812

Website: lppm.unpad.ac.id

Email: lppm.unpad.ac.id

Bandung 45363

1 Jilid, 578: halaman, Ukuran: B5 18 X 20 cm

ISBN: 978-602-0810-45-4

Cetakan: Pertama 2015

ISBN: 978-602-0810-45-4



DAFTAR ISI

KONDISI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA DI SEKTOR BERBAHAYA Oleh: Eka Maulia Agustine, Ishartono, & Risna Resnawaty	1
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Oleh Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, & Rudi Saprudin Darwis	9
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK, Oleh : Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan	17
UPAYA PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK JALANAN, Oleh: Tundzirawati, Binahayati Rusyidi, & Nurliana Cipta Apsari	23
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR ANAK OLEH PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) Oleh: Dian Haerunisa, Budi Muhammad Taftazani, & Nurliana Cipta Apsari	31
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA, Oleh: Arini Fauziah Al haq, Santoso Tri Raharjo, & Hery Wibowo	39
PERLINDUNGAN ANAK DARI BAHAYA KEKERASAN, Oleh: Anita Listyani, Budi Muhammad Taftazani, & Risna Resnawaty	47
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK, Oleh Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah	56
PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK JALANAN DAN ORANG TUA ANAK JALANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL, Oleh Intifadah Ummuhanifah, Moch. Zainuddin, & Gigin Ginanjar Kamil Basar	64
PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK(PKSA) DALAM MEMENUHI KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN, Oleh Yasmin Anwar Putri, Nandang Mulyana, & Risna Resnawaty	72
UPAYA PENANGANAN PEKERJA SEKSUAL ANAK, Oleh Puspa Sagara Asih, Hadiyanto A Rachim, & Nandang Mulyana	79
PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN ANAK ASUH DI PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK, Oleh, Sella Khoirunnisa, Ishartono & Risna Resnawaty	88
PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN, Oleh: Fadilah Putri, Soni A. Nulhaqim, & Eva Nuriyah Hidayat	95
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TRAFFICKING, Oleh: Anis Soraya, Binahayati Rusyidi, & Maulana Irfan	100

PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Oleh: Dimas Bagus Hari Satrio, Budi M. Taftazani, & Herry Wibowo	107
PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA DI LINGKUNGAN PROSTITUSI, Oleh; Dike Farizan Fadhlillah, Santoso Tri Raharjo, & Ishartono	113
PENGASUHAN (<i>GOOD PARENTING</i>) BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS, Oleh: Gabriela Chrisnita Vani, Santoso Tri Raharjo, & Eva Nuriyah Hidayat	121
PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM ISSUE PEKERJA ANAK, Oleh: Hedi Ramdani. Hetty Krisnani, Gigin Ginanjar Kamil Basar	130
PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI RUMAH PERLINDUNGAN ANAK, Oleh: Nanda Aidiel Senja, Hadiyanto A. Rachim, & Rudi Saprudin Darwis	141
PENGARUH PEMENUHAN KESEHATAN ANAK TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK, Oleh: Dienna Karimah, Dra. Nunung Nurwati, & Gigin Ginanjar Kamil Basar	149
PENERAPAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PEKERJA SOSIAL OLEH RELAWAN DALAM PENDAMPINGAN KEPADA ANAK PENDERITA KANKER, Oleh: Pradini Nur'amalia Arliani, Sri Sulastri, dan Budi M. Taftazani,	159
PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK JALANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL, Oleh: Melisa Amalia Amin, Hetty Krisnani, dan Maulana Irfan	168
HUKUM DALAM PERMASALAHAN PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA, Oleh: Andi Rezky Aprilianty Punagi, Ishartono, & Gigin Ginanjar Kamil Basar	179
KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, Oleh: Winda Marienda, Moch. Zainuddin, & Eva Nuriyah H.	186
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH , Oleh: Mamah Halimah, Hetty Krisnani, & Muhammad Fedryansyah	197
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL SEBAGAI ALTERNATIF PROGRAM PEMBERDAYAAN, Oleh: Yesi Fitriani, & Hery Wibowo	204
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL MELALUI PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT, Oleh : Endah Puspa Pratiwi, & Budhi Wibhawa	212
APLIKASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DI JATINANGOR, Oleh: Muhammad Fahmi Amrullah, Moch Zainuddin & Muhammad Fedryansyah	220

PENTINGNYA PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN, Oleh: Dwi Putri Apriyan, Ishartono, & Maulana Irfan	224
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. ANEKA TAMBANG UBPE SEBAGAI SOLUSI MASALAH PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KECAMATAN NANGGUNG, KABUPATEN BOGOR, Oleh: Danis Dea Rizky, Santoso Tri Raharjo, & Risna Resnawaty	231
PEKERJA SOSIAL DAN PENYELESAIAN KONFLIK DI INDONESIA, Oleh: Usep Rochmat, Nandang Mulyana, & Maulana Irfan	240
MENELAAH TEORI <i>DISTRIBUTIVE JUSTICE</i> PADA ISU SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA, Oleh : Santo Arimartin	249
PENGARUH GADGET PADA INTERAKSI SOSIAL DALAM KELUARGA, Oleh: Inda Lestari, Agus Wahyudi Riana, & Budi M.Taftarzani	257
EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL DI INDONESIA, MALAYSIA DAN AMERIKA SERIKAT, Oleh: Adetya Nuzuliani Rahma, R.Nunung Nurwati, & Budi Muhammad taftazani	265
PELAYANAN SOSIAL BAGI REMAJA PUTUS SEKOLAH, Oleh: Elita Metica Tamba, Hetty Krisnani, & Arie Surya Gutama	275
PELAKSANAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA, Oleh: Indah Permata Darma, & Binahayati Rusyidi	282
PEKERJA SOSIAL DAN PENDIDIKAN INKLUSI, Oleh: Nurul Fadhilah Rezeki, & Binahayati Rusyidi	289
<i>THE PRIMARY PROFESSION OF SOCIAL WORKER: EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL SEBAGAI SUATU PROFESI,</i> Oleh : Rizki Bunga Lestari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan	296
KESENJANGAN PENDIDIKAN DESA DAN KOTA, Oleh: Benediktus Vito, Hetty Krisnani, & Risna Resnawaty	313
KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT INDONESIA (PENGETAHUAN, DAN KETERBUKAAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KESEHATAN MENTAL), Oleh: Adisty Wismani Putri, Budhi Wibhawa, & Arie Surya Gutama	320
PENGETAHUAN MASYARAKAT DESA TENTANG KESETARAAN GENDER, Oleh : Resti Fauziah, Nandang Mulyana, & Santoso Tri Raharjo	328
PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM DUNIA INDUSTRI DI INDONESIA, Oleh: Derin Darachita Pradini, Dessy Hasanah Siti A., & Maulana Irfan	341

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA, Oleh: Oktaviani Nindya Putri, Rudi Saprudin Darwis & Gigin Ginanjar Kamil Basar	354
KEBERFUNGSIAN SOSIAL BURUH PEREMPUAN PADA SEKTOR INDUSTRI DALAM KELUARGA, Oleh: Dessy Fitri Pratiwi, Hadiyanto A. Rachim, & Rudi Saprudin Darwis	360
TUJUAN BESAR PENDIDIKAN ADALAH TINDAKAN, Oleh : Burhan Yusuf Abdul Aziizu	374
APLIKASI KEBIJAKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN TATA RUANG DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG, Oleh: Edi Setiawan, Rudi Saprudin Darwis, & M. Fedryansyah	382
PERAN PENDAMPING BAGI ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA), Oleh: Darastri Latifah, Moch. Zainuddin, & Nandang Mulyana	388
EKSISTENSI PROFESI PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA, Oleh : Lina Lisnawati, Santoso Tri Raharjo, & Muhammad Fedryansyah	395
POLA PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL, Oleh: Puti Halimah, Dessy Hasanah Siti A., & Hery Wibowo	406
<i>COMMUNITY BASED DISASTER MANAGEMENT</i> , Oleh : Ridwan Herianto, Soni Akhmad Nulhaqim, & Hadiyanto A. Rachim	414
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYADANG DISABILITAS DI PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI PERKASA PALEMBANG, Oleh : Metra Naibaho, Hetty Krisnani, & Eva Nuriyah H	420
PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI KONSEP <i>COMMUNITY BASED TOURISM</i> , Oleh: Fildzah A'inun N, Hetty Krisnani, & Rudi Saprudin Darwis	432
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PNPM MANDIRI, Oleh: Dhio Adenansi, Moch. Zainuddin, & Binahayati Rusyidi	440
EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL DI RANAH INDUSTRI INDONESIA, Oleh: Danny Dwi Septianto, Sri Sulastri, Gigin Ginanjar Kamil Basar	449
PERKEMBANGAN PERILAKU KEPRIBADIAN REMAJA DENGAN LATAR BELAKANG KEDUA ORANG TUA BERCERAI, Oleh: Aziza Trizilvania Amadea, Santoso Tri Raharjo, & Budi M. Taftazani	457
PROMOSI KESEHATAN IBU DAN ANAK MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BIDANG KESEHATAN IBU DAN ANAK, Oleh: Gina Indah P. Nastia, Hadiyanto A. Rachim, & Maulana Irfan	463

<p>PENANGANAN GIZI BURUK DENGAN PERSPEKTIF PERSON IN ENVIRONMENT OLEH PEKERJA SOSIAL, Oleh: Zulkarnain Bastari, Moch. Zainuddin, Nurliana Cipta Apsari</p>	476
<p>KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENYAKIT MENTAL, Oleh: Berry Choresyo, Soni Akhmad Nulhaqim, & Hery Wibowo</p>	483
<p>PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI GANGGUAN JIWA DAN KETERBELAKANGAN MENTAL, Oleh: Nadira Lubis, Hetty Krisnani, & Muhammad Fedryansyah</p>	492
<p>PEKERJAAN SOSIAL SEKOLAH DAN COPING BEHAVIOR SISWA SMA DALAM MENGHADAPI LINGKUNGAN SOSIAL DI SEKOLAH, Oleh: Rizkia Annisa Frabandani, Agus Wahyudi R., & Santoso Tri Raharjo</p>	501
<p>PEKERJA SOSIAL MEDIS DALAM MENANGANI ORANG DENGAN SKIZOPHRENIA DI RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT, Oleh: Ajruni Wulandestie Arifin, & Soni A. Nulhakim</p>	513
<p>PERAN PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN LANSIA, Oleh: Shinta Puji Triwanti, Ishartono, & Arie Surya Gutama</p>	522
<p>DESA DAN KOTA DALAM POTRET PENDIDIKAN, Oleh: Azwar Yusran Anas, Agus Wahyudi Riana, & Nurliana Cipta Apsari</p>	531
<p>PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DENGAN PENGUATAN KELOMPOK TANI, Oleh: Hafid Ramdhani, Soni Akhmad Nulhaqim, & Muhammad Fedryansah</p>	537
<p>PERAN PEKERJA SOSIAL DI PERINDUSTRIAN INDONESIA, Oleh : Aries Y. Ahmadi, Hadiyanto A. Rachim, & Moch Zaenuddin</p>	546
<p>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SUMEDANG, Oleh: Muhammad Indra Andityaputra, Budhi Wibhawa, & Muhammad Fedryansyah</p>	555

PENGANTAR

Buku ini merupakan kumpulan tulisan mengenai berbagai isu kekinian tentang persoalan-persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Beragam tulisan tersebut dapat saja beranjak dari keperhatian penulis terhadap isu yang diamatinya. Atau juga tulisan-tulisan tersebut merupakan minat untuk mengkaji dan menelaah lebih dalam tentang persoalan sosial tertentu. Apapun tema atau topik tulisan yang tersedia dalam buku ini patut diapresiasi, sebagai bentuk kepedulian para penulis untuk dalam menuangkan gagasan dan kemudian merespon upaya-upaya perubahan positif.

Sebagian besar tulisan yang terdapat buku ini juga merupakan produk pembelajaran yang ada di Program Studi Kesejahteraan Sosial, dimana para mahasiswa dan dosen bermitra dalam membuat tulisan bersama. Gagasan tertulis dapat saja berasal dari dosen, dari mahasiswa, atau hasil diskusi antara dosen dan mahasiswa. Para staf pengajar dan mahasiswa didorong untuk membuat tulisan bersama mengenai isu kekinian kontemporer yang masih tetap menjadi perhatian dan tema hangat di masyarakat, pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Dari tulisan-tulisan hasil kerjasama ini diharapkan akan muncul gagasan-gagasan solutif terhadap berbagai isu tersebut. Sebab, salah satu persoalan atau hambatan dari pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia ini adalah minimnya bahan-bahan bacaan dari bidang-bidang tertentu, termasuk bidang praktek pekerjaan sosial. Sesuatu hal yang sangat musykil terjadi, apabila pengembangan profesi pekerjaan sosial dan studi kesejahteraan sosial akan berkembang dengan maju tanpa didukung dan tertopang dengan bahan-bahan bacaan (buku teks) yang cukup hasil dari kajian-kajian akademik. Padahal di satu sisi, menurut saya, bahwa pengembangan profesi pekerjaan sosial di Indonesia sudah saatnya menjadi

perhatian yang sangat serius. Tentunya perjuangan pengembangan bidang praktek pekerjaan sosial tersebut disesuaikan dengan posisi peran dari masing-masing penggiat profesi pekerjaan sosial. Mudah-mudahan kumpulan tulisan-tulisan dalam buku ini menjadi bagian kuat dari perjuangan tersebut.

Para staf pengajar program-program studi kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial di Indonesia, yang akan melahirkan para pekerja sosial profesional; baik yang *expert* dalam ranah mikro, meso, atau pun makro. Maka, para staf pengajar (dosen) ini memiliki tanggung jawab profesional untuk terus mengembangkan diri dalam keilmuan pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial, yang untuk selanjutnya ditularkan kepada para mahasiswanya. Sebab, hal ini selain sebagai tanggung jawab profesional sebagai pekerja sosial yang melekat pada diri, juga merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai pendidik profesional.

Selain itu juga, sebagai bagian dari perjuangan untuk pengembangan profesi pekerjaan sosial, mengingat jumlah lulusan dari program-program studi pekerjaan sosial/ kesejahteraan sosial di Indonesia masih minim. Maka perlu kiranya memperbanyak sekolah-sekolah atau prodi-prodi kesejahteraan sosial di Indonesia. Sementara itu juga persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat, muncul dengan kecepatan yang hampir tidak terkendali. Di tengah masih terdapatnya pandangan tradisional, baik di kalangan pemerintah dan masyarakat, yang mengakibatkan upaya-upaya penanganan masalah sosial menjadi tidak efektif. Seolah-olah penanganan masalah sosial dapat ditangani oleh siapapun yang hanya bermental perduli untuk terjun-terlibat dalam pengentasan masalah sosial tersebut. Rasa perduli saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan (isu) sosial yang ada, diperlukan cara-cara yang sistematis dan profesional.

Namun, sebagai otokritik, ironisnya pula banyak lulusan-lulusan dari Perguruan Tinggi dengan Jurusan /Program Studi Kesejahteraan sosial yang telah terjebak pada *status quo*, sudah nyaman dengan kondisi dan posisinya masing-masing saat ini. Sehingga tidak jarang, sebagai kecil dari mereka, para lulusan ini mempraktekkan cara-cara pendekatan yang tidak memandirikan masyarakat, terjebak pada ruang ‘birokratis’-‘administratif’. Mereka cenderung terjebak dengan cara-cara berfikir tradisional, tidak berupaya mengembangkan diri, hanya menjalankan hal-hal rutin keseharian, dan akibatnya banyak program-program kesejahteraan sosial yang dilakukan telah menimbulkan eksek negatif atau masalah sosial baru.

Negara ini sesungguhnya sangat mengapresiasi kehadiran pekerja sosial profesional, hal ini ditunjukkan dengan berbagai undang-undang, misalkan UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan beberapa rancangan undang-undang yang diusulkan untuk di-Undang-kan, seperti Rancangan Undang-Undang Disabilitas, dan Rancangan Undang-Undang Praktek Pekerjaan Sosial. Namun demikian suatu perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang baik, apabila penerapannya dilaksanakan secara konsisten. Sehingga kebutuhan dan penghargaan terhadap perlunya dan hadirnya para pekerja sosial di berbagai isu kesejahteraan sosial, yang bukan sekedar bersifat *curative* dan *rehabilitative* semata. Tetapi para pekerja sosial semestinya hadir di berbagai sektor sosial, yang kalau di pemerintahan bukan hanya di Kementrian Sosial saja, tetapi di berbagai kementrian lainnya sepanjang hal tersebut berkait dengan upaya-upaya fungsionalitas sosial atau pemberdayaan masyarakat. Saya fikir, kalau berbicara sektor pemerintahan, di hampir semua sektor pemerintahan para pekerja sosial dapat berkiprah, sesuai dengan ranah

praktek minatnya; apakah akan aktif di ranah mikro, meso atau makro; apakah ranah tersebut melakukan *treatment* atau pelayanan langsung (*direct service*) atau *treatment* tidak langsung (*indirect service*). Pemerintah (legislatif, yudikatif dan khususnya eksekutif) Indonesia perlu selalu didorong, diingatkan dan disadarkan; bahwa negara-negara maju umumnya ditopang dan dilandasi dengan upaya-upaya penanganan isu-isu sosial (khususnya pada sisi preventif) yang dilakukan secara serius. Negara-negara maju umumnya menyadari, bahwa kemajuan-kemajuan ekonomi dan politik yang mereka peroleh sangat ditopang oleh kondisi sosial masyarakatnya yang mapan dan mandiri. Sehingga pembiayaan dan penghargaan terhadap segala upaya untuk memantapkan kondisi sosial masyarakat memang membutuhkan sumber yang besar. Artinya, dukungan pemerintah untuk melindungi profesi pekerjaan sosial di negeri ini sangat diperlukan dan mutlak adanya.

Di sektor swasta peluang praktek pekerjaan sosial jauh lebih luas dan terbuka. Bahkan penghargaan dan pengakuan lebih terasa diberikan oleh sektor swasta. Namun demikian, masyarakat awam pada umumnya masih memahami pekerja sosial sebagai kegiatan yang hanya bersifat karitas saja. Pengakuan penuh lebih dirasakan manakala terdapat beberapa NGO (Non Government Organization) Internasional yang terlibat kegiatan sosial di Indonesia. Mereka umumnya sudah memahami siapa itu pekerja sosial. Ketika bekerja dengan mereka, maka sangat terasa sekali begitu langkanya para pekerja sosial Indonesia yang profesional. Sebab, seringkali pengelola organisasi non pemerintah (ornop) Internasional tersebut seringkali kesulitan mencari kualifikasi pekerja sosial yang dibutuhkan untuk menjalankan aktifitas-aktifitas sosialnya di Indonesia. Demikian pula, pada lembaga-lembaga swasta, khususnya perusahaan-perusahaan yang aktifitas kegiatannya berelasi dengan masyarakat lokalnya. Sehingga mereka sangat membutuhkan tenaga-

tenaga profesional yang mampu membangun relasi yang harmonis melalui pendekatan-pendekatan sosial.

Tulisan-tulisan yang terkumpul dalam buku ini merupakan bagian dari upaya tanpa henti (perjuangan) untuk terus belajar, dan mengembangkan profesi pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Tema-tema tulisan dalam buku ini mewakili rentang isu yang sedang berkembang saat ini. Baik tulisan yang bersifat makro seperti ketenagakerjaan, perindustrian, pertanian, pendidikan, *corporate social responsibility*; atau juga tulisan-tulisan yang bersifat mikro.

Tema-tema tulisan tentang kesejahteraan anak sangat mendominasi tulisan dalam buku ini, khususnya berkaitan dengan kondisi ‘rawan’ baik secara usia dan posisi-peran anak. Sehingga seringkali anak menjadi korban dari situasi yang tidak menguntungkan dari lingkungan sosial terdekatnya. Selanjutnya, tulisan mengenai peran pekerja sosial atau profesi pekerjaan sosial, sebagai respon terhadap setiap tema tulisan yang dibuat oleh penulis menjadi tulisan yang paling banyak ditemui dalam buku ini.

Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua penulis yang telah menuangkan gagasan dan sarannya dalam buku ini. Semoga buku ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan menegakkan ‘profesi pekerjaan sosial’ di negeri sendiri.

Cipageran, Minggu 6 September 2015

Santoso Tri Raharjo
Editor

PENGETAHUAN MASYARAKAT DESA TENTANG KESETARAAN GENDER

Oleh :

Resti Fauziah, Nandang Mulyana, & Santoso Tri Raharjo

Email:

(resfauziah@gmail.com; mulyananandang@gmail.com;
santosotriraharjo@gmail.com)

ABSTRAK:

Pengetahuan Masyarakat Desa tentang Kesetaraan Gender. Isu kesetaraan gender mulai merebak di Indonesia pada tahun 1990-an. Walaupun isu gender telah lama merebak di Indonesia, namun banyak orang yang masih salah mengartikan tentang konsep gender dan kesetaraan gender. Selain gender yang sering disamakan dengan arti seks (jenis kelamin), kemudian salah arti lainnya dimana kesetaraan gender seolah-olah dianggap sebagai tindakan atau keinginan menomorsatukan perempuan yang ada di belahan dunia. Sebuah penelitian pada kelompok perempuan petani pedesaan di Jambi mengungkapkan bahwa pada awalnya masyarakat setempat sangat risih berbicara dengan kesetaraan gender. Mereka beranggapan bahwa kesetaraan gender adalah hal yang tidak lazim dibicarakan, terlalu vulgar dan mendukung aliran liberalisasi serta sekularitas. Penulis memandang kesetaraan gender ini dapat dijunjung tinggi melalui perubahan pola pikir masyarakat yang berkembang saat ini. Pola pikir yang positif tentang kesetaraan gender akan membantu mengurangi kasus-kasus ketimpangan gender di Indonesia. Mengubah pola pikir masyarakat tentunya harus didasarkan pada pengetahuan masyarakat di daerah itu sendiri. Pekerja sosial khususnya bidang pekerja sosial feminis bertugas untuk mengubah pola pikir dan mengedukasi masyarakat baik kaum laki-laki maupun perempuan. Inti dari artikel ini bahwa masyarakat khususnya masyarakat pedesaan memerlukan tambahan pengetahuan tentang kesetaraan gender. Pemahaman tentang kesetaraan gender yang positif pada masyarakat memiliki banyak manfaatnya dalam kehidupan terutama untuk mengurangi kasus-kasus ketidakadilan gender dan permasalahan rumah tangga. Adapun yang menjadi dasar bagi pekerja sosial dalam melakukan intervensi ialah pendidikan, umur, dan sumber informasi di suatu daerah atau masyarakat tersebut.

Kata Kunci : Kesetaraan Gender, Pengetahuan, Masyarakat Desa.

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu yang menarik untuk diperbincangkan apabila menilik pro kontra yang kerap melekat pada isu ini. Isu kesetaraan gender mulai merebak di Indonesia pada tahun 1990-an. Secara perlahan, gerakan feminisme di Indonesia ini menuntut pergeseran posisi kaum

perempuan ke tempat yang lebih setara dalam mendapatkan hak-haknya di bidang sosial maupun budaya. (Nurrahmi : 2009)

Walaupun isu gender telah lama merebak di Indonesia, namun banyak orang yang masih salah mengartikan tentang konsep gender dan kesetaraan gender. Gender sering diartikan dengan seks yang didefinisikan sebagai jenis kelamin yaitu pengkategorian perempuan dan laki-laki. Namun sebenarnya pengertian antara gender dan seks itu berbeda. Seks merupakan pembagian dua jenis kelamin secara biologis. Perbedaan ini sering dikatakan sebagai ketentuan dari Tuhan yang didapat secara kodrati, permanen, tidak berubah, tidak dapat dipertukarkan antara kodrat laki-laki dan perempuan. Gender merupakan pembagian sifat yang ada pada manusia, yang penentuannya didasari secara sosial maupun kultural. Sifat ini dapat dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki. Pembagian sifat pada manusia terbagi atas feminim yang identik dengan karakteristik perempuan, seperti sifat lembut dan sabar, sedangkan maskulin yang identik dengan karakteristik laki-laki mempunyai sifat yang sebaliknya dengan perempuan. Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Mansour Fakih (1996) bahwasannya perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (seks) sementara gender adalah *behavioral differenceness* antara laki-laki dan perempuan yang *socially conructed*. Gender merupakan perbedaan yang bukan kodrat ciptaan Tuhan namun diciptakan oleh masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) melalui proses sosial dan budaya yang panjang.

Kemudian salah arti lainnya dimana kesetaraan gender seolah-olah dianggap sebagai tindakan atau keinginan menomorsatukan perempuan yang ada di belahan dunia. Padahal hal ini bukan merupakan tujuan dari adanya kesetaraan gender itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh R. Valentina (2013) bahwa :

“Tujuan kesetaraan gender adalah untuk mewujudkan keadilan gender dalam pemenuhan HAM; menyelenggarakan tindakan khusus sementara guna mempercepat tercapainya persamaan substantif di segala bidang kehidupan; menyelenggarakan upaya pemenuhan hak perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi; menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; menghapus prasangka, kebiasaan, dan praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan stereotip perempuan dan laki-laki.” (www.institutperempuan.or.id)

Maka dari itu penulis memandang bahwa kesetaraan gender merupakan suatu norma yang seharusnya dijunjung tinggi oleh masyarakat dengan mengacu pada ajaran agama yang dianut masing-masing. Seperti halnya didalam agama Islam, melalui kedua sumbernya Al Qur'an dan Sunnah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan kedudukan laki-laki. (Dr. Marzuki, M.Ag., 2008.) Sehingga apabila kita memahami makna gender secara bijaksana dan obyektif berdasarkan dasar hukum dan agama yang dianut, tentu tidak akan memunculkan penolakan terhadap konsep kesetaraan gender itu sendiri karena sesungguhnya kesetaraan gender adalah hal yang positif.

Di Indonesia saat ini, beberapa pihak mengubah makna kesetaraan gender yang sesungguhnya menjadi semakin melenceng dari hal positif. Sebagaimana dilansir oleh salah satu surat kabar yang menyatakan:

“Di Indonesia, sejumlah pegiat kesetaraan gender tampak semakin aneh ketika mereka tidak segan-segan mendukung eksploitasi perempuan berbentuk beauty contest, seperti ajang Miss Universe atau Putri Indonesia. Padahal, ini bertentangan dengan prinsip feminisme diawal kemunculannya.

Walau dibungkus dengan brain dan behaviour, tapi kemolekan tubuh dan kecantikan wajah para perempuan yang mengikuti ajang tersebut tetap saja menjadi penilaian utama. Bahkan, anehnya, para aktivis gender ini mendukung sepenuhnya, para perempuan itu mengumbar auratnya.”
(www.republika.co.id)

Keadaan yang dijelaskan diatas menurut pandangan penulis tentu akan melahirkan stigma-stigma negatif masyarakat terhadap konsep kesetaraan gender. Sehingga pada akhirnya muncul stigma kemaksiatan dan kemunkaran dipuja sebagai kebebasan dan kemajuan perempuan. Stigma inilah yang berbanding terbalik dengan tujuan kesetaraan gender pada awalnya. Kesetaraan gender dilahirkan dengan tujuan untuk mengatasi atau mencegah permasalahan di masyarakat seputar isu gender dan kesetaraan gender itu sendiri, bukan untuk menomorsatkan perempuan atau membawa perempuan ke arah negatif. Seperti yang diungkapkan oleh Erna Surjadi dalam bukunya yang berjudul *Gender Skateboard* (2011). “Kesetaraan gender mengangkat persamaan akses, peluang partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan.” Oleh karena itu, kesadaran tentang isu kesetaraan gender merupakan hal yang perlu diraih baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan.

Didalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dede William kepada kelompok perempuan petani pedesaan di Jambi mengungkapkan bahwa pada awalnya masyarakat setempat sangat risih berbicara dengan kesetaraan gender. Mereka beranggapan bahwa kesetaraan gender adalah hal yang tidak lazim dibicarakan, terlalu vulgar dan mendukung aliran liberalisasi serta sekularitas. Namun dalam beberapa waktu kemudian, kelompok perempuan disana akhirnya menerima bagaimana konsep kesetaraan gender yang sebenarnya. (Dede William, 2006)

Di dalam pekerjaan sosial, terdapat bidang praktik yang menjunjung kesetaraan gender yang disebut dengan pekerja sosial feminis. Teori feminis menjadi paradigma tersendiri yang dikenal dengan nama *feminist social work* (pekerja sosial feminis). Beranjak dari organisasi sukarela dan aksi masyarakat, perspektif feminis kini merangsek masuk ke bidang-bidang praktik pekerjaan sosial yang lain seperti konseling, terapi kelompok, terapi organisasi, analisis kebijakan sosial, dan penelitian pekerjaan sosial. (Edi Suharto, 2011) Bidang – bidang tersebut adalah lahan bagi pekerja sosial untuk mengedukasi dalam rangka penyadaran masyarakat tentang kesetaraan gender. Kasus-kasus seputar kesetaraan

gender di Indonesia memang banyak ditemukan. Sebagai warga negara yang baik tentunya kita tidak perlu berlebihan dalam membela hak perempuan dengan cara propaganda atau kampanye yang melanggar demokrasi. Kesetaraan gender ini dapat dijunjung tinggi melalui perubahan pola pikir masyarakat yang berkembang saat ini.

Mengubah pola pikir masyarakat tentunya harus didasarkan pada pengetahuan masyarakat di daerah itu sendiri. Sehingga pengetahuan masyarakat dapat dijadikan landasan bagaimana dan apa tindakan yang perlu dilakukan selanjutnya untuk menjadikan masyarakat tersebut lebih paham dan peduli pada isu kesetaraan gender. Sebagaimana dikemukakan Arianto Nugroho dalam Kompas, 2011 : 10 bahwa kesetaraan gender tidak terjadi secara ilmiah, terutama di daerah yang memiliki subkultur yang kuat. Dengan demikian, penulis mengemukakan pertanyaan inti yang akan dibahas pada artikel ini yaitu Bagaimana pengetahuan masyarakat desa tentang kesetaraan gender?

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Gender

Kata Gender berasal dari bahasa Inggris berarti “jenis kelamin”. Dalam *Webster’s NewWorld Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Kata gender jika ditinjau secara terminologis merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris.

Kata gender ini jika dilihat posisinya dari segi struktur bahasa (gramatikal) adalah bentuk nomina (*noun*) yang menunjuk kepada arti jenis kelamin, sex atau disebut dengan *al-jins* dalam bahasa Arab. Sehingga jika seseorang menyebut atau bertanya tentang gender maka yang dimaksud adalah jenis kelamin dengan menggunakan pendekatan bahasa. Kata ini masih terbilang kosa kata baru yang masuk ke dalam khazanah perbendaharaan kata bahasa Indonesia, Istilah ini menjadi sangat lazim digunakan dalam beberapa dekade terakhir. Pengertian gender secara terminologis cukup banyak dikemukakan oleh para feminis dan pemerhati perempuan. Julia Cleves Musse dalam bukunya *Half the World, Half a Chance* mendefinisikan gender sebagai sebuah peringkat peran yang bisa diibaratkan dengan kostum dan topeng pada sebuah acara pertunjukan agar orang lain bisa mengidentifikasi bahwa kita adalah feminim atau maskulin (Rukmina, 2007).

Menurut BKKBN (2007) Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Sedangkan Depkes RI (2008) menjelaskan bahwa gender adalah pembedaan peran, perilaku, perangai laki-laki dan perempuan oleh budaya/masyarakat melalui

interpretasi terhadap perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Jadi gender, tidak diperoleh sejak lahir tapi dikenal melalui proses belajar (sosialisasi) dari masa anak-anak hingga dewasa. Oleh karena itu, gender dapat disesuaikan dan diubah.

B. Kesetaraan dan Ketimpangan Gender

Kesetaraan gender adalah kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Jadi kesetaraan gender adalah menerima dan menilai secara setara (Sufiarti, 2007):

- a. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan
- b. Perbedaan peran yang dipegang oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat
- c. Memahami bahwa perbedaan kondisi hidup laki-laki dan perempuan pada dasarnya karena fungsi melahirkan pada perempuan
- d. Menerima perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai hikmah
- e. Kesetaraan gender tidak sinonim dengan persamaan
- f. Kesetaraan gender berarti sederajat dalam keberadaan, sederajat dalam keberdayaan dan keikutsertaan disemua bidang kehidupan domestik dan publik.

Berdasarkan penjelasan tentang kesetaraan gender di atas penulis dapat mengemukakan bahwa kesetaraan gender cenderung bersifat abstrak, karena murni berasal dari pemahaman dan pola pikir manusia itu sendiri. Oleh karena hal itu, seseorang yang benar-benar memahami konsep kesetaraan gender sesuai dengan pengertian sesungguhnya dan menerima segala hal tentang konsep tersebut maka ia akan bertindak sesuai dengan pemahaman yang dimiliki. Inilah yang menjadi kunci agar masyarakat terhindar dari kasus-kasus yang menunjukkan ketimpangan / diskriminasi gender. Diskriminasi gender adalah segala bentuk tindakan yang menunjukkan keadaan atau posisi tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana penjelasan BKKBN (2007) bahwa Ketidakadilan atau diskriminasi gender sering terjadi dalam keluarganya masyarakat serta di tempat kerja dalam berbagai bentuk, yaitu

- a. *Stereotip/Citra Baku*, yaitu pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya, karena perempuan dianggap ramah, lembut, rapi, maka lebih pantas bekerja sebagai sekretaris, guru Taman Kanak-kanak; kaum perempuan ramah dianggap genit; kaum laki-laki ramah dianggap perayu.
- b. *Subordinasi/Penomorduuan*, yaitu adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contoh: Sejak dulu, perempuan mengurus pekerjaan domestik sehingga perempuan dianggap sebagai “orang rumah” atau “teman yang ada di belakang”.
- c. *Marginalisasi/Peminggiran*, adalah kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus/pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Misalnya, perkembangan teknologi menyebabkan apa yang semula dikerjakan

secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki.

- d. *Beban Ganda/Double Burden*, adalah adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin dimana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya.

C. Konsep Pengetahuan

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah diketahui. Adapun cara mengetahui sesuatu dapat dilakukan dengan cara mendengar, melihat, merasakan sebagainya yang merupakan bagian dari alat indera manusia (Ahmad, 2008).

Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan menurut Sunaryo (2005) mempunyai 6 tingkatan yaitu :

a. *Tahu*

Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Tahu artinya dapat mengingat atau mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.

b. *Memahami*

Memahami diartikan suatu kemampuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan dengan benar tentang objek yang diketahui. Seseorang yang telah paham tentang sesuatu harus dapat menjelaskan, memberikan contoh dan menyimpulkan.

c. *Penerapan*

Yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi nyata atau dapat menggunakan hukum-hukum, rumus, metode dalam situasi nyata.

d. *Analisis*

Suatu kemampuan menguraikan objek-objek kedalam bagian-bagian kecil, tetapi masih di dalam suatu struktur objek tersebut dan masih terkait satu sama lain. Ukuran kemampuan adalah ia dapat menggambarkan, membuat bagan, membedakan, memisahkan, membuat bagan proses adopsi perilaku dan dapat membedakan pengertian psikologi dengan fisiologi.

e. *Sintesis*

Sintesis menunjukan kepada suatu kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru atau kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Ukuran kemampuan adalah ia dapat menyusun, meringkaskan, merencanakan dan menyesuaikan suatu teori atau rumusan yang telah ada.

f. *Evaluasi*

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk mengadakan penilaian terhadap suatu objek. Evaluasi dapat menggunakan kriteria yang telah ada atau disusun sendiri. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau

kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut diatas(Notoatmodjo, 2007).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

1. Pendidikan

Menurut Notoatmodjo (2005) konsep dasar pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti di dalam pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada diri individu, kelompok dan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah suatu proses yang unsurnya terdiri dari masukan(input) yaitu sasaran pendidikan (out put) yaitu suatu bentuk perilaku dan kemampuan dari saran-saran pendidikan. Tujuan pendidikan untuk mengubah perilaku masyarakat yang tidak sehat menjadi sehat. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan anggapan bahwa manusia selalu dapat belajar atau berubah, karena manusia selama hidupnya selalu berubah untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan (Notoadmodjo, 2009).

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. Jenjang pendidikan formal terdiri atas (Depdiknas, 2004 Dalam Notoatmodjo, 2009):

- a. Pendidikan Dasar, Pendidikan dasar berbentuk: Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat; serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Pendidikan Menengah, Pendidikan menengah berbentuk: Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Pendidikan Tinggi, Perguruan tinggi dapat berbentuk: akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/ atau vokasi.

Gangguan terhadap kesehatan juga disebabkan oleh manusia terutama menyangkut pendidikan, pengetahuan dan sikap seseorang dalam menjaga kesehatan apabila tingkat pendidikan seseorang tinggi maka bisa memperbaiki pengetahuan, sikap dan perilaku orang tersebut sehingga mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap kesehatan, baik kesehatan pribadi maupun kesehatan keluarga, Pendidikan merupakan kegiatan yang sengaja dilakukan untuk memperoleh hasil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap seseorang (Notoadmodjo, 2009).

2. Umur

Umur adalah lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan. Umur juga berpengaruh terhadap psikis seseorang dimana usia muda sering menimbulkan ketegangan, kebingungan, rasa cemas dan rasa takut sehingga dapat berpengaruh

terhadap tingkah lakunya. Biasanya semakin dewasa maka cenderung semakin menyadari dan mengetahui tentang permasalahan yang sebenarnya. Semakin bertambah umur maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh, sehingga seseorang dapat meningkatkan kematangan mental dan intelektual sehingga dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam bertindak (Hurlock, 2005).

Pieter (2010) menguraikan bahwa secara umum masa dewasa dikelompokkan atas tiga bagian yaitu:

- a. Dewasa dini (*early adulthood*) (21-35 tahun) Masa dewasa dini selalu dianggap sebagai penyesuaian diri terhadap kehidupan dan harapan sosial baru. Kriteria utama periode dewasa dini yaitu interdependen, kesediaan untuk bertanggung jawab dan mempunyai pekerjaan. Interdependen dan tanggung jawab menentukan kondisi kehidupan emosional, sosial dan ekonomi.
- b. Dewasa madya (*middle adulthood*) (35-45 tahun) Kangas dan bradway menyimpulkan bahwa saat periode dewasa madya terdapat kenaikan pada kemampuan intelektual, terutama pada tingkat kecerdasan tinggi. Pria akan menunjukkan perubahan intelektual lebih tinggi dibandingkan wanita. Pria akan menunjukkan peningkatan nilai intelegensi ketika mereka tua.
- c. Dewasa akhir (*late adulthood*) (45-60 tahun) Batasan usia dewasa akhir adalah usia 45-65 tahun dengan perubahan fisik yang menonjol dibandingkan dengan perubahan psikologis. Bagi pria yang memasuki periode ini ditandai dengan memasuki fase klimakterium, sedangkan wanita ditandai dengan fase menopause. Ketidakseimbangan fisiologis akan berdampak pada terganggunya keseimbangan emosi seperti stres dan depresi.

3. Sumber Informasi

Menurut Notoatmodjo (2005), sumber informasi mempengaruhi pengetahuan baik dari media maupun orang-orang dalam terkaitnya dengan kelompok manusia memberi kemungkinan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi anggota-anggota. Seseorang di dalam proses pendidikan juga memperoleh pengetahuan melalui berbagai macam alat bantu. Alat Bantu media akan membantu dalam melakukan penyuluhan. Alat Bantu dapat dibagi dalam tiga macam:

a. *Media Cetak*

Yaitu sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan kesehatan dengan variasi seperti: (1) Booklet. Suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan dalam bentuk tulisan maupun gambar. (2) Leaflet. Bentuk penyampaian informasi melalui lebaran yang dilipat. informasi dapat dalam bentuk kalimat maupun dalam bentuk gambar. (3) Selebaran. (4) Lembar balik (Flip Chart). Bentuk penyampaian pesan atau informasi-informasi dalam bentuk lembar balik di manatiap lembar berisi gambaran peragaan dan di baliknya berisi kalimat yang berkaitan dengan gambar tersebut. (5) Rubik atau tulisan-tulisan pada surat kabar atau majalah yang berkaitan dengan topik terkait. (6) Foster. Bentuk media cetak berisi pesan-pesan atau informasi kesehatan yang biasanya ditempel di tembok-tembok, di tempat-tempat umum atau dikendaraan umum.

b. *Media Elektronika*

Media sarana komunikasi merupakan sarana komunikasi dengan menggunakan elektronik terdiri dari televisi, radio, video, dan lain-lain. Untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi

c. *Media Papan*

Papan yang dipasang di tempat-tempat umum yang diisi dengan pesan-pesan atau informasi kesehatan. Informasi adalah keterangan pemberitahuan kabar berita tentang suatu media dan alat (sarana) komunikasi seperti Koran, majalah, radio, televisi, poster, spanduk, internet. Media komunikasi adalah media yang digunakan pembaca untuk mendapatkan informasi sesuatu atau hal tentang pengetahuan.

PEMBAHASAN

Pengetahuan Masyarakat Desa tentang Kesetaraan Gender

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesetaraan gender berbicara tentang penerimaan dan penilaian seseorang terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian pengetahuan masyarakat desa tentang kesetaraan gender menggambarkan bagaimana masyarakat menerima dan menilai dua jenis kelamin yang berbeda dalam kedudukan dan posisi setara dalam berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan tingkat pengetahuan, maka pengetahuan masyarakat desa dapat digolongkan dalam beberapa kategori. Namun, penulis memandang hal ini secara nyata tidak menentukan tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang kesetaraan gender. Salah satu keadaan pada kehidupan nyata misalnya pada keluarga petani di suatu desa. Suami dan istri membagi tugas secara adil dalam hal pekerjaan tanpa memandang pekerjaan tersebut cenderung harus dilakukan oleh perempuan atau laki-laki. Suami dan istri pada keluarga petani saling bekerja sama ketika mereka sedang berada di sawah. Sehingga perempuan yang melekat dengan kata lemah lembut, gemulai, dan tidak mampu melakukan pekerjaan berat semuanya tidak berlaku lagi ketika sedang bekerja di sawah. Pembagian-pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dilakukan atas kesadaran masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau disampingkan. Hal yang demikian menggambarkan bahwa keluarga petani di desa tersebut sesungguhnya telah menerapkan konsep kesetaraan gender pada kehidupan keseharian mereka di sawah. Akan tetapi kondisi tersebut belum tentu mengartikan bahwa mereka telah paham apa makna dari kesetaraan gender itu sendiri.

Beralih dari konsep yang pertama mengenai tingkatan pengetahuan, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang seperti yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka, diantaranya : pendidikan, umur, dan sumber informasi. aspek-aspek tersebut dijadikan kategori oleh penulis dalam melakukan analisis bagaimana pengetahuan masyarakat desa tentang kesetaraan gender.

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan pengetahuan seseorang. Seperti yang dijelaskan pada tinjauan pustaka, manusia selama hidupnya selalu berubah untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dengan demikian pengetahuan seseorang dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh. Jalur pendidikan dapat ditempuh melalui pendidikan formal dan non formal pada fasilitas-fasilitas yang tersedia. Namun, hal yang menjadi titik kesulitan utama masyarakat desa ialah kekurangan fasilitas pendidikan terdekat. Sehingga sebagian besar masyarakat desa yang mengalami kesulitan dalam biaya transportasi tidak meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya hingga saat ini masih banyak masyarakat desa yang memiliki pendidikan lulusan SD terutama penduduk usia dewasa akhir dan lansia. Selain karena faktor jarak, adapula faktor ekonomi yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa yang umumnya bermatapencaharian sebagai petani. Seperti yang telah diungkapkan pada tinjauan pustaka bahwa masyarakat kota pada awalnya merupakan masyarakat desa. Oleh karena itu pendidikan di pedesaan tidak diam di tempat melainkan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Sehingga wajar bila pada saat ini sebagian kecil penduduk di desa sudah memiliki ijazah perguruan tinggi. Secara linear, hal ini juga berhubungan dengan pengetahuan masyarakat desa tentang kesetaraan gender. Didalam tinjauan pustaka disebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula pengetahuan orang tersebut. Oleh karena itu tidak semua warga desa yang belum memahami konsep gender dan kesetaraan gender. Akan tetapi bergantung pada tingkat pendidikan seluruh penduduk yang ada di desa tersebut. Sehingga penulis mengasumsikan jika tingkat pendidikan penduduk di suatu desa sangat rendah atau termasuk desa tertinggal maka pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan genderpun akan rendah. Masyarakat yang tidak memahami konsep gender dan kesetaraan gender kemudian akan menganggapnya sebagai salah satu hal yang tabu. Oleh karena itu, desa dengan tingkat pendidikan penduduk yang rendah berpotensi besar bagi pekerja sosial untuk diberikan intervensi.

2) Umur

Semakin bertambah umur maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh, sehingga seseorang dapat meningkatkan kematangan mental dan intelektual sehingga dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam bertindak (Hurlock, 2005).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh gambaran bahwa pengetahuan seseorang akan bertambah seiring bertambahnya usia atau pengalaman seseorang tersebut. Oleh karena itu, semakin tua umur seseorang maka seharusnya ia semakin mengerti tentang konsep kesetaraan gender. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan di pedesaan yang rata-rata penduduk berpendidikan rendah adalah ia yang berusia tua, maka pengetahuan masyarakat desa tentang kesetaraan genderpun akan rendah pada penduduk dengan usia tua. Sehingga penulis mengasumsikan bahwa intervensi pekerjaan sosial perlu diberikan kepada usia penduduk desa

dengan tingkat pendidikan rendah dan kategori usia yang paling membutuhkan. Kategori usia yang paling membutuhkan ialah usia yang rawan berhadapan dengan kasus-kasus ketidakadilan gender diantaranya dewasa dini dan dewasa madya.

3) Sumber Informasi

Sumber informasi baik dari media maupun orang-orang di sekitar akan mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Dengan demikian diperoleh analogi jika sumber informasi tentang kesetaraan gender di suatu daerah jumlahnya terbatas maka pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat tentang kesetaraan genderpun akan kurang. Namun, sumber informasi juga dapat menjadi penyebab munculnya kekeliruan paham masyarakat tentang kesetaraan gender. Oleh karena itu diperlukan media dan cara penyampaian yang tepat untuk mengubah paham masyarakat dari yang asalnya tidak tahu menjadi tahu dan asalnya berfikir negatif menjadi berfikir positif. Hal ini dapat terjadi pada masyarakat pedesaan dengan kategori daerah terpencil, tingkat ekonomi rendah atau pendidikan rendah, dan tingkatan religius yang kental (tinggi).

PENUTUP

Kesimpulan

Kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender berawal dari pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pengetahuan yang positif tentang kesetaraan gender akan membawa manfaat yang banyak bagi setiap perempuan dan laki-laki dalam menjalani tugas-tugas kehidupan. Sedangkan kekeliruan atau ketidakpahaman masyarakat mengenai makna kesetaraan gender dapat menjadi penyebab bertambahnya kasus-kasus kesetaraan gender yang terjadi pada masyarakat Indonesia baik pada laki-laki maupun perempuan. Kasus KDRT, perceraian yang semakin marak terjadi pada awalnya disebabkan oleh disfungsi pembagian kerja, peran, hak, dan pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga pemahaman tentang kesetaraan gender tujuan utamanya adalah untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan mendorong terbentuknya keluarga-keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian bukan hanya perempuan yang perlu memahami kesetaraan gender, tetapi justru laki-laki. Secara fakta tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar dialami oleh kaum perempuan. Dengan demikian yang perlu mendapatkan perubahan sikap ialah orang yang melakukan tindakan kekerasan tersebut. Memberikan pemahaman hingga berwujud menjadi kesadaran dan perubahan sikap merupakan bagian dari tugas fungsi pekerjaan sosial sebagai pembawa perubahan sekaligus *problem solver*. Dalam hal ini intervensi pekerjaan sosial dapat berbentuk tiga upaya yaitu, *engage*, *educate*, *empower*.

Engage diantaranya merupakan upaya pekerjaan sosial untuk menghubungkan korban-korban ketidakadilan gender kepada pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan. *Educate* yaitu upaya memberikan pemahaman kesetaraan gender kepada masyarakat terutama kelompok-kelompok yang

mempengaruhi pengetahuan. Faktor-faktor tersebut diantaranya pendidikan, umur, dan sumber informasi.

Berdasarkan pendidikan, kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan rendah berpotensi besar memiliki pengetahuan yang rendah tentang kesetaraan gender. Berdasarkan usia, pengetahuan tentang kesetaraan gender semakin meningkat seiring bertambahnya usia dan bertambahnya pendidikan seseorang. Namun kategori usia yang paling membutuhkan edukasi ialah mereka yang rawan berhadapan dengan kasus ketidakadilan gender yaitu penduduk yang telah berrumah tangga diantaranya usia dewasa dini dan dewasa madya. Berdasarkan sumber informasi, pengetahuan masyarakat desa tentang kesetaraan gender akan rendah pada daerah yang memiliki kekurangan sumber informasi mengenai hal terkait. Sumber informasi juga merupakan faktor penyebab penting ketidakpahaman dan kekeliruan masyarakat pedesaan memaknakan kesetaraan gender. Oleh karena itu tugas pekerja sosial feminis yaitu memberikan pemahaman yang sesuai kepada kelompok yang tepat melalui media penyampaian yang tepat. Karakteristik masyarakat pedesaan menjadi dasar utama yang harus dipertimbangkan oleh pekerja sosial dalam melakukan praktik pelayanan.

Inti dari artikel ini bahwa masyarakat khususnya masyarakat pedesaan memerlukan tambahan pengetahuan tentang kesetaraan gender. Pemahaman tentang kesetaraan gender yang positif pada masyarakat memiliki banyak manfaatnya dalam kehidupan terutama untuk mengurangi kasus-kasus ketidakadilan gender dan permasalahan rumah tangga. Adapun yang menjadi dasar bagi pekerja sosial dalam melakukan intervensi ialah pendidikan, umur, dan sumber informasi di suatu daerah atau masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan e-Book

Surjadi, Erna. 2011. *Gender Skateboard: Kekuatan spirit Gender dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Pustaka Harapan.

Fakih, Mansoer. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahmawati, Ika. 2003. *Modul Analisis Gender*. Jakarta: The Asia Foundation.

Notoatmodjo S. (2007). *Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni*. Rineka Cipta, Jakarta.

Depkes RI, (2008), *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan KIE Kesehatan Reproduksi Untuk Petugas Kesehatan Di Tingkat Pelayanan Dasar*, Depkes RI, Jakarta.

Dede William, (2006), *Gender Bukan Tabu, Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan Di Jambi*, CIFOR, Bogor, Indonesia.

BKKBN, (2007), *Program Pembinaan Jarak Jauh, Pangarusutamaan Gender (PJJ-PUG), Konsep Dan Teori Gender*, BKKBN, Jakarta.

Jurnal, Hasil Penelitian, dan Skripsi

Asyhari. 2009. Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi (Skripsi).

Rukmina, (2007), *Fenomena Bias Gender Dalam Pendidikan Islam*, Jurnal, Vol.4, Jakarta.

Sufiarti, (2007), *Laporan Penelitian Persepsi Perempuan Berkarir Di Lingkungan UPI Tentang Konsep Kesetaraan Gender*, Jurnal, Jakarta.

Website dan Blog

<http://syafroafni.wordpress.com/2013/01/12/masyarakat-desa-dan-masyarakat-kota/>
diunduh pada Selasa, 4 November 2014 pukul 04.10 WIB.

www.institutperempuan.or.id
(www.republika.co.id)